

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan, pemerintah memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara minimal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Untuk mewujudkannya, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan program penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu tuntas pada tahun 2012. Mengingat makin mendekatnya waktu pencapaian target tersebut, pemerintah mempertegas kembali dengan menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang menginstruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala BPS, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan dan mensukseskan program pemerintah dimaksud (Fakrinur, 2007: 3).

Pendidikan dasar 9 tahun sekarang menjadi pendidikan pokok di Indonesia, itu artinya peserta didik minimal lulus paling rendah lulus SMP, akan tetapi di lapangan masih ditemukan berbagai hal, dimana siswa SD tidak semuanya dapat tertampung di SMP bahkan kuantitas SMP tidak sebanding dengan SD yang ada, taruhlah jika SD di satu kecamatan ada 35

SDN dan MI sebanyak 5, sedangkan SMP negeri dan swasta rata-rata mencapai 10 itu sudah bagus. Padahal rasionya dengan SD dengan SMP 1: 8. Apakah mungkin secara kasat mata jumlah SMP tersebut dapat menampung lulusan SD dan MI. Hampir dipastikan tidak semua lulusan SD melanjutkan ke SMP atau MTS (Ruhyana, 2011: 1).

Pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir umumnya SMP belum didirikan atau SMP yang sudah ada berada di luar jangkauan lulusan SD setempat. Dikarenakan jumlah lulusan SD di daerah tersebut pada umumnya relatif sedikit, maka pembangunan Unit Sekolah Baru SMP dipandang tidak efisien. Di lain pihak daerah tersebut merupakan daerah-daerah dimana APK SMP masih rendah dan merupakan lokasi tempat anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat (Muhammad, 2007: 4).

Di daerah terpencil, angka partisipasi bersekolah masih rendah atau angka partisipasi kasar (APK) berada pada persentase 60-70% dan mayoritas hanya lulusan SD. Data siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun 2003/2004 berjumlah 29.142.093 orang dengan rincian siswa SD sebanyak 25.928.626 orang dan siswa MI sebanyak 3.213.467 orang. Sedangkan angka kelulusan tahun 2003/2004 untuk SD sebanyak 3.673.241 orang dan MI sebanyak 3.213.467 orang. Dari jumlah tersebut yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP untuk lulusan SD sebanyak 542.258 orang (Anonim, 2005: 2).

Inilah akar masalahnya, sampai kapanpun jika sistem pendidikan yang dilakukan selama ini ketika lulus SD melanjutkan ke sekolah berikutnya yang jumlah sekolah relatif tidak seimbang atau belum mendekati jumlah lulusan SD, maka permasalahan peserta didik yang tidak melanjutkan ke SMP tidak akan pernah terselesaikan. Belum lagi jika budaya masuk ke SMP atau pendidikan selanjutnya dengan alasan tertentu sekolah akan mengambil iuran atau sumbangan pendidikan yang menjadi problematika di setiap awal tahun ajaran.

Solusinya adalah sistem pendidikan selama ini harus dirubah dengan cara pendidikan satu atap untuk pendidikan dasar. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada tahun anggaran 2005 akan membangun Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) satu atap pada 460 lokasi di kabupaten dan provinsi yang penduduknya memiliki angka partisipasi bersekolah relatif rendah (Anonim, 2005: 2).

Pendidikan satu atap untuk pendidikan dasar artinya pendidikan SD dan SMP harus disatukan dalam satu atap pendidikan, sehingga lulusan SD secara otomatis diterima di SMP sehingga angka tidak melanjutkan dapat diminimalisir dan pengeluaran orang tua dalam sumbangan pendidikan dapat dihindari secara sistematis (Ruhana, 2011: 1).

SD-SMP Satu Atap, adalah SMP 'biasa' yang tempat belajarnya di gedung SD di mana siswa itu, tadinya, menyelesaikan pembelajaran tingkat SD-nya. Mereka tetap belajar di gedung SD itu dikarenakan SMP biasa

berada di lokasi yang relatif jauh. Sementara, untuk dibangun (gedung) SMP baru di daerah terjangkau belum memungkinkan karena jumlah murid yang akan ditampung (tamatan SD) terlalu kecil. Jadi, mereka belajar pelajaran SMP di gedung tempat mereka belajar pelajaran SD (Fekrinur, 2007: 1).

SMP Satu Atap adalah salah satu usaha pemerintah untuk mengejar tercapainya target APK SMP-MTs 95 % di tahun 2008. Ini dilakukan atau dibiayai dengan dana dekonsentrasi dari APBN untuk tahun pertama keberadaannya di masing-masing kabupaten dan kota yang menerimanya; sedangkan untuk kemudian, untuk tahun kedua mereka dapat melanjutkannya sendiri dengan dana APBD kabupaten/kota masing-masing (Fekrinur, 2007: 2).

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan SD SMP satu atap sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Seperti penelitian yang dilakukan (Wiwik, 2011) yang menyimpulkan bahwa perencanaan pendirian SD-SMP Satu Atap sesuai dengan persyaratan terisolir, terpencil dan terpencar; berdasarkan kebutuhan masyarakat (*social demand approach*); dalam perencanaan melibatkan berbagai pihak. Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kependidikan.

Namun demikian ada beberapa kasus mengenai terselenggaranya SD SMP satu atap seperti SD SMP Satu atap masih kekurangan sarana prasarana (Andi, 2011). Jumlah siswa yang banyak dan melebihi kapasitas,

sehingga perlu pembangunan sarana seperti ruang laboratorium, semenisasi lapangan upacara, penambahan kekurangan local (RKB) dan WC

Tahun 2004 telah dilakukan verifikasi kelayakan ke sejumlah provinsi dan Kabupaten yang mengusulkan pengembangan SD-SMP Satu Atap. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut telah ditetapkan sekitar 360 lokasi, dan mulai operasional tahun pelajaran 2005/2006. Salah satu dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang adalah SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang mulai digulirkan pada awal tahun yang masih membutuhkan banyak perhatian dan kajian yang mendalam.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini mengkaji mengenai pengelolaan sekolah SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Kecamatan Magelang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan sekolah SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang? Fokus ini dijabarkan menjadi tiga subfokus sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik kegiatan akademik program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang?
2. Bagaimana karakteristik kegiatan non akademik program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang?

3. Bagaimana karakteristik evaluasi program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik kegiatan akademik program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik kegiatan non akademik program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang.
3. Untuk mendeskripsikan karakteristik evaluasi program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah untuk memberikan masukan bagi pengembangan mutu pendidikan. Penyelesaian masalah pendidikan untuk pemerataan pendidikan, khususnya di daerah terpencil yang masih membutuhkan fasilitas pendidikan yang seharusnya dipertimbangkan oleh perencana di masa mendatang.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan praktek perencanaan.

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan terkait penyediaan sarana pendidikan, peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dan pemerataan pelayanannya. Manfaat khusus adalah mengkaji pengelolaan sekolah SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Kecamatan Sawangan Magelang.

E. Daftar Istilah

1. SD SMP Satu Atap adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaanya terpadu
2. Kegiatan akademik program SD SMP Satu Atap adalah kegiatan pengelolaan SD SMP Satu Atap yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah.
3. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk untuk melihat secara langsung di lapangan mengenai implementasi program subsidi dan untuk memberikan umpan balik terhadap rencana dan implementasi kegiatan guna perbaikan penyusunan program tahun anggaran mendatang.